

# Bahaya Apatisme Pemuda terhadap Kehidupan Bernegara: Edukasi Partisipasi Politik Karang Taruna Ira Kusuma Yogyakarta

Murti Ayu Hapsari<sup>1\*</sup>

Sri Handayani Retna Wardhani<sup>2</sup>

Nita Ariyani<sup>3</sup>

Devi Andani<sup>4</sup>

## Abstrak

Tujuan penulisan ini adalah mensosialisasikan secara tertulis tentang partisipasi politik terhadap pemuda yang merupakan hal yang layaknya dilakukan secara berkelanjutan. Negara demokrasi yang sehat membutuhkan partisipasi warga negara, khususnya pemuda yang berkualitas untuk bisa tetap melanjutkan eksistensinya. Tim Pengabdian Fakultas Hukum Universitas Janabadra berusaha untuk menanamkan pengetahuan tentang pentingnya partisipasi politik serta bahayanya sikap apatis terhadap kebijakan pemerintah. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman serta meningkatkan kesadaran Pemuda Karang Taruna Ira Kusuma di Yogyakarta terkait dengan pendidikan politik, sedangkan tujuan penulisan adalah untuk mempublikasikan lebih lanjut mengenai kegiatan tersebut. Metode pelaksanaan terdiri dari dua tahap yaitu tahap persiapan serta tahap pelaksanaan sosialisasi. Keseluruhan rangkaian berjalan dengan baik dengan meningkatnya pemahaman pemuda Karang Taruna Ira Kusuma terkait pentingnya partisipasi politik.

**Kata Kunci:** Sosialisasi; Partisipasi Politik; Negara Demokrasi.

## Abstract

*The purpose of this paper is to socialize in writing about political participation in youth which is something that should be done on an ongoing basis. A healthy democracy requires the participation of citizens, especially qualified youth to be able to continue their existence. Janabadra University's Faculty of Law Service Team seeks to instill knowledge about the importance of political participation as well as the dangers of apathy towards government policies. This socialization aims to provide understanding and increase awareness of the Karang Taruna Ira Kusuma Youth in Yogyakarta related to political education, while the purpose of writing is to publish more about the activity. The implementation method consists of two stages, namely the preparatory stage and the socialization implementation stage. The whole series went well with the increasing understanding of "Karang Taruna" youth Ira Kusuma regarding the importance of political participation.*

**Keywords:** Socialization; Political Participation; Democracies.

## How to cite (Chicago Style):

Hapsari, Murti Ayu, Sri Handayani Retna Wardhani, Nita Ariyani, and Devi Andani. 2022. "Bahaya Apatisme Pemuda Terhadap Kehidupan Bernegara: Edukasi Partisipasi Politik Karang Taruna Ira Kusuma Yogyakarta" *DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum & Humaniora* 2 (2): 105-117

<sup>1</sup> Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Janabadra. Yogyakarta, Indonesia. \*Correspondence E-mail: [murtiayu@janabadra.ac.id](mailto:murtiayu@janabadra.ac.id)

<sup>2</sup> Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Janabadra. Yogyakarta, Indonesia. E-mail: [yani@janabadra.ac.id](mailto:yani@janabadra.ac.id)

<sup>3</sup> Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Janabadra. Yogyakarta, Indonesia. E-mail: [nita\\_ariyani@janabadra.ac.id](mailto:nita_ariyani@janabadra.ac.id)

<sup>4</sup> Program Studi Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Janabadra. Yogyakarta, Indonesia. E-mail: [devi\\_andani@janabadra.ac.id](mailto:devi_andani@janabadra.ac.id)

## Pendahuluan

Partisipasi politik atau partisipasi politik merupakan salah satu indikator untuk mengukur apakah demokrasi yang dijalankan di suatu negara merupakan demokrasi yang sehat. Berdasarkan teori politik maupun teori hukum, pembuatan kebijakan dalam tingkatan apa pun memerlukan partisipasi publik yang *meaningful* atau berarti. Artinya, legitimasi dari proses pembentukan kebijakan akan hilang apabila partisipasi publik tidak dilaksanakan, atau bahkan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Hakikatnya partisipasi politik masyarakat dapat menjadi sarana untuk mengontrol jalannya pemerintahan yang akan terpilih. Partisipasi masyarakat juga dapat menjadi alat untuk mengekspresikan eksistensi individu atau kelompok sosial (Hafidz 2019). Proses partisipasi publik dalam pemerintahan tidak selalu dalam skala yang besar seperti pembentukan kebijakan, keikutsertaan masyarakat dalam mengkritisi kebijakan serta tindakan pemerintahan juga merupakan salah bentuk kepedulian terhadap bagaimana negara dijalankan (*governed*). Proses ini tidak akan terjadi apabila masyarakat bersikap acuh dan apatis terhadap segala proses pemerintahan.

Porsi demografis penduduk Indonesia didominasi oleh kelompok muda, berdasarkan penelitian oleh Yayasan Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) kelompok muda cenderung apatis terhadap pemerintahan serta berpartisipasi secara politik namun lebih fokus pada aktivisme-aktivisme alternatif yang dianggap lebih memberikan kontribusi konkrit pada masyarakat; aktivisme lingkungan, aktivisme advokasi finansial, dan lain sebagainya (Nowak 2021). Namun demikian, sejarah telah

mencatatkan peran serta keterlibatan pemuda telah berjasa menentukan peristiwa persimpangan sejarah serta perkembangan politik di Indonesia (Nowak 2021).

Apatisme terhadap pemerintah memang bukan barang baru dalam kehidupan perpolitikan di Indonesia, fenomena ini telah dibahas mulai dari masa Reformasi 1998 dimulai. Era teknologi dan informasi memberikan sarana serta kemudahan yang besar bagi masyarakat, khususnya pemuda untuk mengakses informasi dan berpartisipasi terhadap jalannya pemerintahan, namun sarana tersebut tidak membuat masyarakat paham akan kondisi jalannya pemerintahan, tidak jarang kalangan terpelajarpun acuh terhadap hal ini (Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada 2017). Sikap apatis dari pemuda tidak dapat dilihat hanya dari satu dimensi. Terdapat beberapa dalih yang mendorong tumbuhnya sikap tersebut.

Salah satu penyebab adalah banyaknya oknum otoritas pemerintah yang dalam kinerjanya tidak fokus pada kesejahteraan rakyat namun pada kepentingan dirinya sendiri beserta golongannya. Gambaran tersebut tidak menafikan bahwa pergerakan perbaikan dapat berasal dari *grassroot* atau akar rumput, atau yang biasa disebut dengan perubahan *bottom-up*; yaitu perubahan yang didorong dari masyarakat bawah. Salah satu usaha untuk memantik hal tersebut adalah dengan edukasi politik, khususnya terkait dengan memperkenalkan pentingnya partisipasi politik dan publik kepada pemuda. Menyadari pentingnya edukasi politik, Pemerintah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik secara rutin telah melaksanakan pendidikan politik pada generasi muda. Namun dalam hal ini, akademisi juga memiliki tanggung jawab moral sebagai pendidik untuk ikut serta memberikan edukasi politik relevan pada pemuda untuk mewujudkan negara demokratis. Pengabdian kepada masyarakat bertema pendidikan politik baru kali ini dilakukan oleh Tim Pengabdian, namun beberapa kali penulis sudah menulis publikasi ilmiah terkait dengan hak-hak serta kewajiban warga negara dalam bingkai negara demokrasi Indonesia.

Berdasarkan faktor-faktor dan pertimbangan tersebut, Tim Pengabdian Fakultas Hukum Universitas Janabadra melakukan penyuluhan serta edukasi pendidikan politik pada Pemuda Karang Taruna Irakusuma yang berada di Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Mitra Pemuda Karang Taruna Irakusuma dijadikan mitra oleh karena telah secara resmi dan tertulis telah memberikan undangan serta permohonan kepada Tim Pengabdian untuk memberikan edukasi serta penyuluhan terkait pendidikan politik.

## Luaran

Luaran pertama dari pengabdian ini adalah meningkatnya pemahaman serta kesadaran Pemuda Karang Taruna Irakusuma yang berada di Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta atas pentingnya partisipasi publik dan partisipasi politik dalam kehidupan bernegara. Luaran kedua adalah artikel jurnal yang *di-submit* di jurnal pengabdian masyarakat.

## Metode Pelaksanaan

Proses pelaksanaan pengabdian dibagi menjadi dua tahap, yaitu:

- 1) Tahap persiapan, tahap ini terdiri dari:
  - a. Tahap koordinasi internal dengan Tim Pengabdian Fakultas Hukum Universitas Janabadra membahas dan mempersiapkan materi dan mendiskusikan pendekatan yang akan diterapkan dalam penyuluhan. Dalam tahap ini juga dibahas mengenai lokasi pelaksanaan penyuluhan.

- b. Tahap koordinasi eksternal dengan Pemuda Karang Taruna Irakusuma membahas mengenai jadwal pelaksanaan penyuluhan serta target audiensi penyuluhan.
- 2) Tahap pelaksanaan penyuluhan/sosialisasi  
Tahap pelaksanaan melibatkan pengurus Pemuda Karang Taruna Irakusuma sebagai panitia untuk membantu kelangsungan proses

## Hasil dan Pembahasan

### Bahaya Apatisme dalam Negara Demokrasi

Apatisme adalah ketidakpedulian individu di mana yang bersangkutan tidak memiliki perhatian atau minat pada aspek tertentu, salah satunya adalah aspek kehidupan sosial bermasyarakat. Terdapat beberapa definisi dari apatisme, antara lain adalah ketidakpedulian individu dalam menentukan beberapa aspek kehidupan, apatis kerap diartikan sebagai pasif terhadap hal yang menyangkut isu-isu sosial. Sikap apatisme bisa dilihat dari kurangnya tanggung jawab sosial (Sarfaraz et al. 2012).

Hal yang lebih spesifik, yaitu apatisme dalam hal politik dapat diartikan sebagai kurangnya simpati serta empati terhadap masalah pemerintahan, serta pemilu. Sikap ini dipengaruhi oleh dua dimensi; yaitu dimensi sikap serta dimensi perilaku. Perilaku apatisme antara lain berupa ketidaktertarikan pada proses politik, ketidakpercayaan tanpa dasar terhadap lembaga politik serta pemerintahan, dan berujung pada keengganan untuk berpartisipasi di dalamnya (Marsuki, Oruh, and Agustang 2022). Apatisme kerap kali terdapat di kalangan pemuda dan remaja oleh karena ketidaktertarikannya pada politik serta faktor lain seperti dianggap tidak adanya figur pejabat negara yang cukup berwibawa serta berkompetensi untuk menjalankan

tugasnya. Rosenberg dan Rush mengelaborasi setidaknya tiga alasan pokok seorang individu bersikap apatis, antara lain:

- 1) Ketakutan atas konsekuensi negatif dari aktivitas politik
- 2) Menganggap bahwa partisipasi dalam dunia politik merupakan hal yang sia-sia
- 3) Tidak ada ketertarikan untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik (Rush and Althrof 2001).

Apatisme bukanlah sesuatu yang dapat dipandang enteng, oleh karena dalam negara demokrasi yang sehat idealnya setiap warga negara memiliki pemikiran dan sikap tersendiri serta memiliki tanggung jawab terhadap hal tersebut. Apatisme dapat mengakibatkan rendahnya legitimasi kekuasaan, apabila konteksnya adalah dengan partisipasi pemilu lebih lanjut, apatisme terhadap proses pemerintahan dan pembentukan kebijakan menjadi ancaman tersendiri oleh karena banyak aspek yang terlibat di sana, mulai dari aspek sosial, budaya, hukum, ekonomi, dan lain sebagainya.

Konsekuensi negatif dari sikap apatis bagi masyarakat sangat luas. Rendahnya kepedulian dan partisipasi publik menyebabkan oknum otoritas untuk menyalahgunakan sumber daya milik publik dan menjalankan agenda-agenda kebijakan yang diskriminatif (Fraser 2020) serta stagnasi politik dan kekuasaan dalam arti negatif, yaitu stagnasi politik yang dapat berujung pada pemerintahan yang otoriter.

### **Peran Serta Pemuda dalam Negara Demokrasi**

Partisipasi masyarakat, atau dalam hal ini pemuda, diperlukan atas beberapa dasar pemikiran berikut:

- 1) Partisipasi diperlukan untuk memahami keadaan sosial dan ekonomi yang senyatanya

- 2) Partisipasi diperlukan untuk dapat menganalisis sebab dan akibat dari permasalahan yang terjadi di masyarakat
- 3) Partisipasi diperlukan untuk dapat mengatasi permasalahan di masyarakat tersebut
- 4) Partisipasi diperlukan untuk meningkatkan keswadayaan yang kuat sehingga dapat menghilangkan ketergantungan terhadap pihak luar (Karamoy 2015).

Berdasarkan pemikiran tersebut, dapat disimpulkan bahwa bentuk partisipasi pemuda tidak hanya terbatas melalui satu jalur yang formal atau konvensional. Pemuda dapat mengikuti dan mengakses berbagai saluran-saluran politik dari berbagai komunitas yang melakukan advokasi-advokasi kegiatan sosial tertentu, seperti komunitas advokasi lingkungan hidup, komunitas advokasi kegiatan sosial-kemanusiaan, kegiatan keagamaan, dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil survei nasional oleh BPS, Susenas tahun 2021 yang lalu terlihat bahwa hampir seperempat penduduk Indonesia (23,90%) berada dalam kelompok umur pemuda yang notabene menjadi bonus demografi kuat yang nantinya dapat mendorong transformasi Indonesia dalam pembangunan. Pemuda, sebagai entitas harapan wajib mempersiapkan diri untuk mencapai potensi terbaiknya agar dapat memberikan kontribusi positif di masa depan (Sari et al. 2021).

Lebih lanjut, partisipasi generasi muda dalam perumusan kebijakan serta untuk memberikan kontrol pada kinerja pemerintah merupakan hal penting, baik bagi masyarakat dan bagi kehidupan pemuda secara langsung. Ruang partisipasi yang terbatas, serta sikap apatisisme merupakan beberapa hambatan yang dihadapi dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Berdasarkan COO Think Policy Indonesia, fenomena ini hendaknya disikapi dengan optimis, terdapat sejumlah gerakan pemuda berbasis isu sektoral yang menyuarakan aspirasi serta pandangannya terhadap kebijakan publik

berdasarkan fokusnya masing-masing. Hal yang penting dilakukan adalah mengintegrasikan kegiatan-kegiatan tersebut (J et al. 2021).

Tatanan hukum di Indonesia sudah memberikan beberapa landasan hukum partisipasi publik dalam konteks proses legislasi, antara lain adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta perubahannya, dan Peraturan DPR No.1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Beberapa koridor juga telah dibentuk untuk mendukung partisipasi publik, antara lain Sistem Informasi Legislasi (SILEG), SIMAS PUU, serta Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) (Hanifa 2021). Beberapa lembaga pemerintahan juga telah gencar mempromosikan pentingnya partisipasi melalui kanalnya masing-masing (RI 2019) (Aprilia and Azmi 2021).

Berdasarkan fakta tersebut, dapat diidentifikasi bahwa terdapat jarak atau gap antara pemerintah dengan masyarakatnya kaitannya dengan saluran partisipasi publik. Tim Pengabdian Fakultas Hukum Universitas Janabadra dalam hal ini fokus untuk melakukan edukasi pentingnya keterlibatan atau partisipasi publik khususnya bagi pemuda. Upaya ini dikategorikan dalam pendidikan politik, dikutip dari Kantaprawira dalam Pahlevi dan Amrullohi, merupakan kegiatan atau aktivitas yang memiliki tujuan untuk membentuk nilai-nilai moral serta orientasi politik dalam individu. Pendidikan politik hakikatnya mendorong masyarakat berpartisipasi sebagai anggota masyarakat yang bertanggungjawab dalam perpolitikan negara. Upaya ini merupakan upaya preventif (Pahlevi and Amrullohi 2020).

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami artikel ini, maka tulisan dibagi menjadi beberapa sub-bab; sub-bab gambaran umum Pemuda Karang Taruna Irakusuma dan manfaat dari penyuluhan yang dilaksanakan oleh Tim Pengabdian.



## Gambaran Umum Karang Taruna Ira Kusuma

Karang Taruna Ira Kusuma berlokasi di Dusun Kalupucang, Bangunjiwo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan utama dari organisasi sosial kemasyarakatan ini adalah sebagai wadah para anggotanya untuk mengembangkan diri dalam masyarakat untuk tumbuh atas dasar kesadaran dan tanggung jawab secara sosial. Latar belakang didirikan organisasi pemuda ini adalah untuk mendorong pemuda setempat, yang kala itu tidak memiliki kegiatan, sehingga banyak dari pemuda yang melakukan perbuatan tidak konstruktif dan cenderung merusak diri. Melihat kondisi yang demikian, Bapak Susanto, Bapak Joko, dan Bapak Timbul, pendiri dari Karang Taruna Ira Kusuma, membentuk wadah kegiatan bagi para pemuda tersebut (Nita et al. 2021). Karang Taruna Ira Kusuma secara rutin mengadakan pertemuan untuk membahas kemajuan internal organisasi dan acara pertemuan yang mendatangkan narasumber untuk memberikan sosialisasi atau penyuluhan bagi anggota-anggotanya.

## Edukasi Partisipasi Publik Pemuda Karang Taruna Ira Kusuma

Sejarah telah mencatat bahwa peran serta esensi pemuda dalam memperjuangkan kemerdekaan, Pemuda selalu menjadi garda terdepan perubahan sosial dan politik, tahun 1998 menjadi saksi sejarah bahwa gerakan pemuda berhasil menjatuhkan rezim otoritarian yang telah berkuasa selama lebih dari 3 dekade. Karakteristik pemuda yang responsif serta tidak mudah terlena dengan stagnasi atau status quo merupakan landasan penting bagi pemuda untuk membangun negara menuju arah yang lebih baik. Selain kesempatan dan saluran (*channel*) berpolitik yang lebih luas dari golongan demografi lainnya, pendidikan politik menjadi penting untuk membentuk karakter peduli kepada kondisi masyarakat mulai dari skala terkecil terlebih dahulu.

Tim Pengabdi mengambil tajuk “Sosialisasi Pendidikan Politik: Pentingnya Partisipasi Publik”, dalam hal ini Tim Pengabdi berusaha untuk menggunakan bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami. Pendekatan yang digunakan oleh Tim Pengabdi adalah pendekatan konsep; konsep manusia sebagai makhluk politik serta macam-macam partisipasi politik itu sendiri, dengan pendekatan tersebut pemuda akan lebih bisa *me-relate* materi sosialisasi dengan kesehariannya.

Tim Pengabdi memperkenalkan bahwa manusia merupakan makhluk yang memiliki dua sisi (monodualis) yaitu manusia sebagai makhluk individu serta sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki arti bahwa manusia butuh berinteraksi dengan manusia lain untuk bisa hidup. Dasar pemikiran itulah yang membentuk masyarakat dan negara. Tidak dapat dipungkiri bahwa hidup dalam suatu masyarakat dan negara memiliki *rules* atau aturannya sendiri-sendiri. Aturan yang ditetapkan hakikatnya adalah agar untuk mewujudkan kehidupan bersama yang tenteram dan tanpa konflik. Aturan atau kebijakan, dalam suatu negara hukum merupakan suatu hal yang penting, oleh karena seluruh kepentingan dan kebutuhan warga negara dituangkan dalam dokumen tersebut. Kerangka konsep negara demokrasi mewajibkan pengambil kebijakan untuk mengikutsertakan warga negara untuk memberikan pertimbangan (*meaningful involvement*). Konsep ini didasari dari fakta bahwa manusia pada dasarnya adalah seorang insan politik—yaitu makhluk yang hakikatnya berpolitik untuk hidup.

Lebih lanjut Tim Pengabdi juga mengenalkan bentuk-bentuk partisipasi politik, mulai dari yang paling sederhana hingga yang tataran paling kompleks. Dalam pemaparan ini Tim Pengabdi berusaha untuk mengajak pemuda Karang Taruna Ira Kusuma untuk ikut berpartisipasi dengan; 1) tidak bersikap apatis, namun kritis terhadap kebijakan pemerintah; 2) mulai untuk menyuarakan aspirasi atau pendapat

terhadap suatu hal, sesederhana apa pun hal tersebut. Tim Pengabdi memberikan gambaran tentang manfaat dari partisipasi publik terhadap jalannya pemerintahan.

Sesi terakhir dari acara sosialisasi ini adalah sesi diskusi, dalam sesi ini beberapa peserta anggota Pemuda Karang Taruna Ira Kusuma memberikan pendapat, pandangannya, serta pertanyaan pada Tim Pengabdi terkait materi sosialisasi. Secara keseluruhan acara sosialisasi berjalan lancar, tujuan dari sosialisasi tercapai dengan meningkatnya pemahaman serta kesadaran peserta tentang pentingnya partisipasi publik, hal ini ditandai dengan peserta dapat menjawab pertanyaan dari Tim Pengabdi terkait dengan materi yang disosialisasikan.

## Kesimpulan

Partisipasi politik merupakan jiwa dari negara demokrasi, masa depan dari negara demokrasi Indonesia harus terus diperjuangkan oleh pemuda-pemudanya. Sosialisasi dari Tim Pengabdi Fakultas Hukum Universitas Janabadra bertujuan untuk memberikan kembali pemahaman tentang bahayanya sikap apatis, serta pentingnya berpartisipasi dalam kehidupan bernegara. Keseluruhan rangkaian acara sosialisasi oleh Tim Pengabdi terlaksana dengan baik dan lancar dengan meningkatnya pemahaman serta kesadaran (*awareness*) dari Pemuda Karang Taruna Ira Kusuma terhadap partisipasi publik dan partisipasi politik.

## Referensi

### Buku dan Jurnal

Aprilia, Cici Riska, and Alia Azmi. 2021. "Sosialisasi Pemilu Tahun 2019 Terhadap Pemilih Pemula Oleh KPU Kabupaten Solok Selatan." *Journal of Civic Education* 4 (1): 32–38. <https://doi.org/10.24036/JCE.V4I1.439>.

- Marsuki, Nur Riswandy, Shermina Oruh, and Andi Agustang. 2022. "Youth Apathy in Political Contest: A Case Study in the 2020 Gowa Regency Head Election." *JED (Jurnal Etika Demokrasi)* 7 (1): 73–82. <https://doi.org/10.26618/JED.V7I1.6296>.
- Nita, Ariyani, Handayani Retna Wardani Sri, Andani Devi, and Adhi Pratama Fauzie. 2021. "Edukasi Hak Anak Atas Kesehatan Dan Pendidikan Dalam Rangka Mencegah Perkawinan Usia Dini Di Karang Taruna Ira Kusuma." In *Seminar Nasional Karya Pengabdian Ke-II*, 1–13. Yogyakarta: Universitas Janabadra.
- Nowak, Nurman. 2021. *Pemuda, Politik Dan Keterlibatan Sosial Di Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia.
- Pahlevi, Moch Edward Trias, and Azka Abdi Amrurrobi. 2020. "Pendidikan Politik Dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa." *Integritas : Jurnal Antikorupsi* 6 (1): 141–52. <https://doi.org/10.32697/INTEGRITAS.V6I1.611>.
- Rush, Michael, and Philip Althrof. 2001. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sarfaraz, Ayesha, Shehla Ahmed, Ayesha Khalid, and Asir Ajmal. 2012. "Reasons for Political Interest and Apathy among University Students: A Qualitative Study." *Pakistan Journal of Social and Clinical Psychology* 10 (1): 61–67.
- Sari, Nindya Riana, Andry Poltak L. Girsang, Sigit Wahyu Nugroho, Nindya Putri Sulistyowati, Hendrik Wilson, Rhiska Putrianti, and Ganish Anggraeni. 2021. *Statistik Pemuda Indonesia 2021*. Edited by Budi Santoso, Ika Maylasari, Raden Sinang, Adhie Surya Mustari, and Yeni Rachmawati. Jakarta: Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=NTIzMzNkMmNIMGE3NDhmZmY2NDY5ODEx&xzmn=aHR0cHM6Ly93d3cuYnBzLmdvLmlkL3B1YmxpY2F0aW9uLzIwMjEvMTIvMjEvNTIzMzNkMmNIMGE3NDhmZmY2NDY5ODExL3N0YXRpc3Rpay1wZW11ZGEtaW5kb25lc2lhLTIwMjEuaHRtbA%3D%3D&twoadfnarf>.

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

Beberapa koridor juga telah dibentuk untuk mendukung partisipasi publik, antara lain Sistem Informasi Legislasi (SILEG), SIMAS PUU, serta Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)

## Website

- Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada. 2017. "Fenomena Apatisme Masyarakat Terhadap Politik Di Indonesia – Sosialpolitik.Filsafat.Ugm.Ac.Id." 2017. <https://sosialpolitik.filsafat.ugm.ac.id/2017/07/28/fenomena-apatisme-masyarakat-terhadap-politik-di-indonesia/>
- Fraser, Caroline. 2020. "Political Apathy Reasons & Consequences | African Development Choices." 2020. <https://africandevelopmentchoices.org/political-apathy/>.
- Hanifa, Ledia. 2021. "Partisipasi Publik Dalam Proses Legislasi." 2021. <https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/-Regulasi-dan-Dokumen-Paparan-OPI-Partisipasi-Publik-Dalam-Legislati-oleh-Hj.-Ledia-Hanifa-S.Si.-M.PSi.T-1622102422.pdf>.
- J, M Paschalia Judith, Riana A Ibraihim, Elsa Emiria Leba, and Sekar Gandhawangi. 2021. "Ruang Partisipasi Pemuda Dalam Kebijakan Publik Belum Optimal - Kompas.Id." 2021. <https://www.kompas.id/baca/metro/2021/08/20/ruang-partisipasi-pemuda-dalam-kebijakan-publik-belum-optimal>.